gryo

galeri hunian layak Indonesia

KEMENPKP
REPUBLIK INDONESIA

Merdeka Punya Rumah



edisi 2 2026


Puri Delta City Side
Type
29/72
Spesifikasi
• Pondasi Footplat
• Lantai Keramik 50x50
• Kusen Alumunium
• Rangka Atap Baja Ringan
• Atap Genteng Beton
• Dinding Bata Merah
• Closet Jongkok
• Listrik 1300 Watt
• Air Bersih PDAM / Artetis

grya

Pelindung
Sekretaris Jenderal

Penanggung Jawab
Kepala Biro
Komunikasi Publik

Redaktur
Kepala Bagian
Pelayanan Publik dan
Publikasi
Erwin Alimudin

Penulis
Avifah Setiyani
Ilham Bintang
Indar Amila
Kinanti Juli
Michael Prilas
Raden Bintang Agna
Ameta Dian

Penyunting
Digna Margareth
Michael Prilas
Erwin Alimudin

Desain Grafis
Digna Margareth
Michael Prilas

Fotografer
Rafly April
Fitrah Faizal
Wahyu Ady

Diterbitkan Oleh
Sekretariat Jenderal
Kementerian
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

Alamat Redaksi
Wisma Mandiri II,
Jalan Kebon Sirih
Nomor 83, Kebon
Sirih, Menteng,
Jakarta Pusat, DKI
Jakarta

Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, tetapi juga tentang hadirnya rasa aman, kesempatan untuk tumbuh, dan ruang bagi setiap keluarga untuk menata masa depan. Semua itu sering kali bermula dari rumah.

Rumah bukan sekadar tempat berlindung. Di sanalah harapan tumbuh, anak-anak belajar dan bermimpi, serta keluarga membangun masa depan. Karena itu, memaknai kemerdekaan juga berarti memastikan masyarakat memiliki kesempatan untuk menempati hunian yang layak, aman, sehat, dan terjangkau.

Pembangunan perumahan bukan semata menghadirkan bangunan fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di balik setiap rumah, ada keluarga yang ingin hidup lebih baik dan harapan agar kemajuan Indonesia dapat dirasakan hingga ke ruang paling dekat dengan kehidupan kita.

Semangat kemerdekaan mengingatkan bahwa membangun Indonesia merupakan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan memiliki peran dalam mewujudkan ekosistem perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dari rumah, kita memaknai kemerdekaan. Dari keluarga, kita membangun harapan. Dan dari hunian yang layak, kita menyiapkan masa depan Indonesia.

Semangat inilah yang terus menjadi bagian dari perjalanan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menghadirkan hunian layak dan kawasan permukiman berkualitas bagi masyarakat.

Selamat membaca dan menemukan berbagai cerita tentang rumah sebagai bagian dari perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan yang semakin bermakna bagi seluruh rakyat.



Sekretaris Jenderal
Didyk Choiroel, S.Sos., M.Si.

Daftar Isi

Serambi
4 Mengapa Rumah Menjadi Bagian dari Kemerdekaan?

Jendela
5 Sejarah & Makna HAPERNAS

Ruang Utama
6 Merdeka Punya Rumah
8 Bicara Angka : Penurunan Backlog BPS
10 Rangkaian Lomba 17 Agustus di KemenPKP
12 Rangkaian HAPERNAS 2026

Beranda
14 Berita Akad Massal Batang
16 Berita SLIK OJK
18 KemenPKP Meraih WTP
19 SKB Dua Menteri
20 Groundbreaking Rusun Manggarai
22 Danantara Housing Expo 2026
24 Anugerah Layanan Investasi 2026

Kabar Program 3 Juta Rumah
26 Realisasi Capaian per 1 September 2026
28 Berita SLIK OJK
29 Data Realisasi KPP

Pojok Regulasi dan Kebijakan
30 Permen PKP No. 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah

Profil Daerah / Tokoh Inspiratif
32 Profil Moh. Hatta (Bapak Perumahan Nasional)

Info Balai
34 Profil Balai Nusa Tenggara 1 (Kandidat WBK)

Inovasi dan Teknologi
36 Aplikasi Digital Go PKP

Kabar Warga
38 Cerita Penerima Bantuan BSPS

Gaya Hidup dan Arsitektur
40 RISHA & Bata Interlock

Kolom ASN PKP
42 Harapan untuk HAPERNAS 2026 dari ASN PKP

Ruang Publik
44 Survei Kepuasan Masyarakat
45 Ringkasan permintaan informasi publik



Mengapa *Rumah* Menjadi Bagian dari Kemerdekaan?

Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan. Namun juga tentang kesempatan untuk hidup dengan aman dan layak.

Rumah menjadi salah satu bagian penting dari kehidupan.

Di balik setiap rumah yang dibangun, ada kehidupan yang akan berlangsung di dalamnya. Ada keluarga yang memiliki tempat untuk pulang, ruang untuk bertumbuh, dan kesempatan untuk menata kehidupan ke depan.

Karena itu, makna kemerdekaan juga hadir dalam hal-hal yang dekat dengan keseharian. Ketika sebuah keluarga memiliki tempat yang layak untuk pulang, ketika ada ruang yang aman untuk tumbuh, dan ketika kehidupan dapat dijalani dengan lebih baik.

Semangat tersebut sejalan dengan Program 3 Juta Rumah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Melalui program ini, pemerintah berupaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

Rumah yang layak adalah salah satu wujud nyata kemerdekaan. Di sanalah nilai-nilai kehidupan dibentuk, keluarga tumbuh, dan langkah ke depan dimulai. Ketika sebuah keluarga memiliki rumah yang layak, di situlah kemerdekaan hadir dalam bentuk yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari.



HARI PERUMAHAN NASIONAL

25 Agustus 1950

Wakil Presiden RI Mohammad Hatta, membuka Kongres Perumahan Sehat yang berlangsung di Bandung

6 Agustus 2008

Diterbitkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 46/KPTS/M/2008 tentang Hari Perumahan Nasional, yang menetapkan tanggal 25 Agustus sebagai Hari Perumahan Nasional

"Cita-cita untuk terselenggaranya kebutuhan perumahan rakyat bukan mustahil apabila kita sungguh-sungguh mau dengan penuh kepercayaan, semua pasti bisa."

- Moh Hatta -

Kongres Perumahan Sehat 1950



Pemikiran Bung Hatta tentang Perumahan

semakin jelas dalam pidatonya pada Kongres Perumahan Rakyat Kedua di Jakarta tahun 1952. Menurutnya, rumah yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, bersama pangan, sandang, dan kesehatan.



Di masa sekarang, semangat tersebut tetap relevan. Tantangan perumahan terus berkembang, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus berupaya menjawab tantangan perumahan melalui Program 3 Juta Rumah.



Rumah Subsidi melalui Skema FLPP



Pembangunan Rumah Susun



Kredit Program Perumahan



Program Bedah Rumah



Penataan Kawasan Kumuh

Pada akhirnya, HAPERNAS menjadi pengingat bahwa cita-cita menghadirkan rumah bagi rakyat adalah perjalanan yang terus berlanjut. Dari Kongres Perumahan Rakyat Sehat tahun 1950 hingga berbagai program perumahan saat ini, semangatnya tetap sama: mewujudkan hunian yang layak agar setiap keluarga dapat hidup aman, sehat, nyaman, dan bermartabat.

Ilham Bintang








102

MERDEKA PUNYA RUMAH

Bangga Punya Rumah Hasil Sendiri!

Sejak dulu tinggal bersama orang tua, sekarang akhirnya bisa punya rumah sendiri.

> **“Kalau punya rumah sendiri, kita pastinya bangga dong! Apalagi dari hasil sendiri, kerjaan sendiri, jadinya sekarang nggak perlu numpang lagi**

Suka sekali sama rumah subsidinya **Ambassador Residence 3** di Singkawang ini, kualitasnya bagus, airnya lancar, listrik oke, rumahnya cantik, jalanan juga sudah bagus, selama di sini tidak pernah banjir, jadinya kita merasa senang.

Lokasinya strategis, dua menit dari pasar, dari rumah sakit juga dekat, karena ini masih masuk kawasan ramai.

Dengan penghasilan sekitar 6 juta sebulan, saya ambil tenor 10 tahun dengan cicilan bulanan 1,8 juta Rupiah.

Bintang Agna

> **“Semoga melalui program Rumah Bersubsidi ini, lebih banyak lagi lainnya yang bisa punya rumah sendiri seperti saya**

Lisan, 38 tahun
Penjual asinan *online*
Singkawang, Kalimantan Barat

Kekurangan Rumah Menurun, Akses Hunian Layak Meningkat



Langkah Bersama Memperluas Kepemilikan dan Meningkatkan Kualitas Rumah Masyarakat

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2026, akses masyarakat terhadap rumah layak huni terus meningkat. Sementara itu, kekurangan kepemilikan dan kelayakhunian menunjukkan tren penurunan, menandakan bahwa berbagai program pemerintah semakin tepat sasaran.

Kekurangan Kepemilikan Rumah

9,92 JUTA

Rumah Tangga Belum Memiliki Rumah Sendiri

Turun 0,61% rumah tangga dibandingkan 2025.

2025	2026
9,64 juta	**9,29 juta**
13,00%	12,39%



- Menempati bangunan yang berstatus **bukan milik sendiri.** (kontrak Sewa, bebas sewa, rumah dinas, atau lainnya)
- Kepala rumah tangga/ pasangannya/ anaknya **tidak memiliki rumah** milik sendiri. selain yang ditempati saat ini

Kekurangan Rumah Layak Huni

18,01 JUTA

Rumah Tangga Masih Menghadapi Persoalan Kelayakhunian

2025	2026
18,77 juta	**18,01 juta**
25,33%	24,03%



70,30% **Rumah Tangga Memliki Akses terhadap Rumah Layak Huni** naik dari 68,40 % pada tahun 2025

INDIKATOR RUMAH LAYAK HUNI (BPS RI 2026)

- Ketahanan Bangunan **87,52%**
- Luas Lantai Memadai **94,91%**
- Air Minum Layak **93,71%**
- Sanitasi Layak **86,73%**

Menutup Kesenjangan, Membangun Harapan

Mengurangi kekurangan rumah bukan sekadar tentang angka.

Di balik setiap rumah yang terbangun dan setiap hunian yang diperbaiki, terdapat keluarga yang memperoleh ruang hidup yang lebih aman, sehat, dan layak. Pemerintah terus memperkuat ekosistem perumahan melalui penyediaan rumah. peningkatan kualitas hunian, serta akses pembiayaan yang semakin luas.

Refly

TIGA PILAR UTAMA

MENYEDIAKAN Rumah Baru

- Rumah Subsidi
- Rumah Susun
- Rumah Khusus
- Kolaborasi Pemerintah dan Pengembang



MENINGKATKAN Rumah Layak

- Bedah Rumah/BSPS
- Peningkatan RTLH
- Sanitasi dan Prasarana dasar
- Penanganan
- Kawasan Permukiman



MEMUDAHKAN Akses Pembiayaan

- FLPP
- Kredit Program Perumahan
- Pembiayaan Mikro Perumahan
- Kolaborasi Lembaga Pemerintah







Capaian Semester I 2026

Bedah Rumah	FLPP
38.635 unit	91.531 unit





Perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia












AMBULANS






DOUBLE FISH


SELAMAT BERTANDING
JUNJUNG TINGGI SPORTIVITAS











HAPERNAS 2026

Menjaga Semangat Perumahan melalui Aksi dan Kepedulian

Hari Perumahan Nasional (HAPERNAS) diperingati setiap tanggal 25 Agustus sebagai momentum untuk kembali menguatkan semangat dalam mewujudkan penyediaan perumahan bagi masyarakat. Pada tahun 2026, rangkaian HAPERNAS di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diisi dengan sejumlah kegiatan yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga mengedepankan nilai penghormatan dan kepedulian.

Rangkaian kegiatan diawali dengan ziarah ke makam Bung Hatta pada 3 September 2026. Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan ziarah secara khidmat untuk mengenang Bung Hatta, Bapak Proklamator sekaligus Bapak Perumahan Nasional, yang memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan perumahan di Indonesia.





Semangat kepedulian kemudian diwujudkan melalui kegiatan donor darah yang dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada 4 September 2026 di Kantor Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian PKP, dan 7 September 2026 di Wisma Mandiri I. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian HAPERNAS yang mengajak insan Kementerian PKP untuk berbagi dan memberikan manfaat bagi sesama.

Selain donor darah, rangkaian HAPERNAS 2026 juga diisi dengan Cek Kesehatan Gratis. Berbagai kegiatan tersebut menjadi wujud semangat HAPERNAS yang tidak hanya berbicara mengenai rumah sebagai tempat tinggal, tetapi juga tentang kepedulian, kebersamaan, dan upaya membangun kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.

Indar Amila











Akad Massal Batang, Jawa Tengah: 62.710 Keluarga Resmi Punya Rumah

Dari Batang, Jawa Tengah, untuk seluruh Indonesia, momen ribuan keluarga akhirnya pegang kunci rumah sendiri.

Bayangkan menunggu bertahun-tahun untuk sesuatu yang sesederhana: rumah sendiri. Lalu suatu siang di Batang, penantian itu berakhir bukan cuma untuk satu keluarga, tapi 62.710 keluarga sekaligus.

Pada 30 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto hadir langsung di Perumahan Puri Delta City Side untuk meresmikan akad massal KPR Rumah Subsidi dan KUR Perumahan terbesar yang pernah ada. Angkanya bikin kaget: 62.710 unit rumah, tersebar di 36 provinsi, dengan total nilai Rp880 miliar. Sebanyak 7.100 debitur hadir langsung mewakili puluhan ribu keluarga lain yang ikut merasakan momen ini dari daerah masing-masing.



> “Saya bangga dan bahagia bahwa kita sebagai pemerintah dapat memberi kebahagiaan kepada 62.000 keluarga warga negara kita.”
>
> Presiden Prabowo Subianto

Rekor yang Belum Pernah Tercapai Sebelumnya

Menteri PKP Maruarar Sirait punya alasan kuat untuk tersenyum lebar hari itu. Penyaluran rumah subsidi lewat skema FLPP di era Presiden Prabowo tercatat sebagai yang tertinggi sepanjang 15 tahun program ini berjalan, dari 228 ribu unit di 2023, melonjak jadi 278 ribu unit di 2025.

Di balik lonjakan ini ada serangkaian kebijakan yang bikin rumah subsidi makin terjangkau: BPHTB yang tadinya 5% kini digratiskan, PBG juga gratis untuk MBR, plus insentif PPN DTP. Yang paling terasa buat masyarakat mungkin ini: bunga KPR subsidi tetap dijaga di 5,0%, bahkan saat BI Rate sudah di 5,75%. Uang muka pun cuma 1%, sudah termasuk asuransi. Dan lewat kerja sama dengan BP Tapera, Kementerian Keuangan, dan OJK,sekarang cicilan bisa ditenor sampai 40 tahun, jauh lebih ringan buat kantong.

Suara dari Penerima Manfaat

Angka-angka besar itu jadi terasa dekat kalau dengar cerita orang-orang di baliknya. Dalam sesi dialog virtual bersama Presiden, sejumlah penerima manfaat berbagi cerita, salah satunya Sarah, pedagang kios kelontong asal Banda Aceh yang baru berusia 23 tahun. Lewat KPR Sejahtera FLPP, ia jadi salah satu wajah generasi muda yang berhasil mewujudkan mimpi punya rumah sendiri, sesuatu yang dulu terasa jauh dari jangkauan.

> "Terima kasih kepada Bapak Presiden. Berkat program KPR Sejahtera FLPP, kami generasi Z bisa memiliki rumah impian."
> - Sarah, penerima manfaat asal Banda Aceh

Cerita serupa juga datang dari dua rumah subsidi yang sempat ditinjau langsung oleh Presiden sebelum acara akad dimulai, milik Rosmini, pedagang sembako, dan Rahma Yuliani, yang sehari-hari bertugas sebagai satpam. Kunjungan singkat itu jadi pengingat sederhana: di balik setiap unit rumah subsidi, ada kehidupan nyata yang berubah.

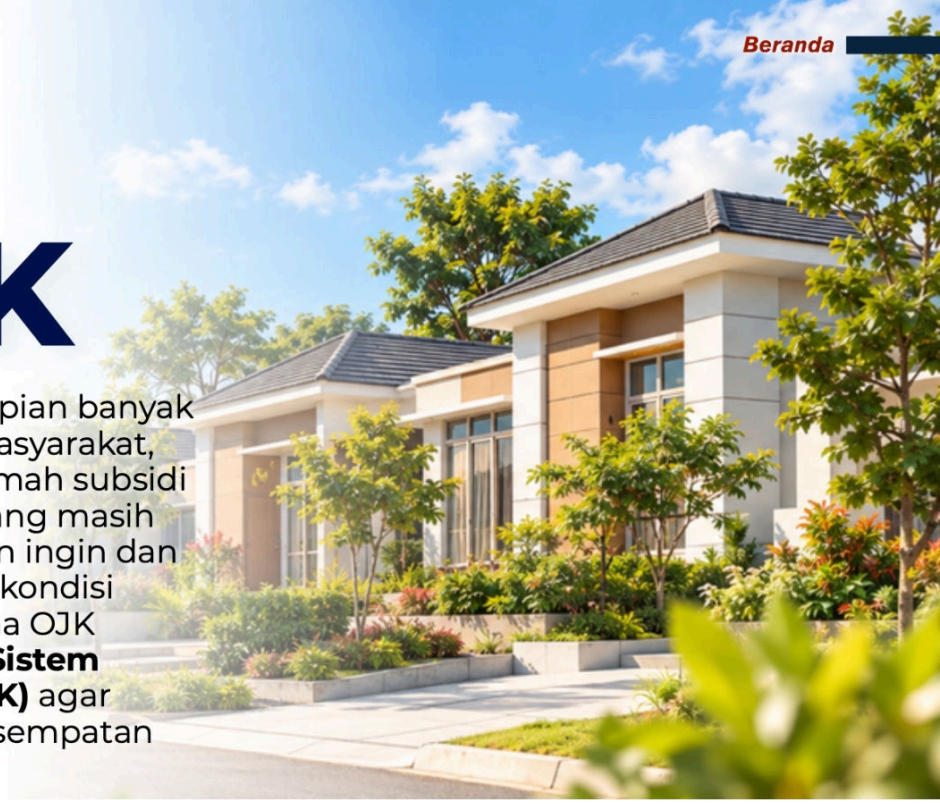
Michael Prilas

> “Prestasi yang sudah kita capai sungguh signifikan, tapi kita menyadari masih lebih banyak yang diperlukan rakyat kita.”
> Presiden Prabowo Subianto





Kebijakan SLIK OJK



Memiliki rumah sendiri menjadi impian banyak keluarga. Namun, bagi sebagian masyarakat, perjalanan untuk mendapatkan rumah subsidi tidak selalu berjalan mudah. Ada yang masih terkendala catatan kredit, meskipun ingin dan mampu mengajukan KPR. Melihat kondisi tersebut, Kementerian PKP bersama OJK mendorong perubahan kebijakan **Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)** agar semakin banyak masyarakat berkesempatan memiliki rumah.

Perjalanan Kebijakan SLIK

07 APRIL 2026



Pembahasan Penyempurnaan Kebijakan

Menteri PKP Maruarar Sirait bertemu dengan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi di Kantor OJK, Jakarta. Pertemuan ini membahas penyempurnaan kebijakan SLIK, khususnya dalam penyaluran KPR subsidi bagi MBR.

13 APRIL 2026



Kebijakan Baru SLIK

- Catatan kredit dengan nominal di bawah Rp1 juta tidak ditampilkan dalam SLIK.
- Data kredit yang telah dilunasi diperbarui maksimal H+3 setelah pelunasan.
- Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) bersama untuk mempercepat program perumahan rakyat

06 JULI 2026



Optimalisasi SLIK Resmi Diluncurkan

Penyempurnaan kebijakan SLIK kemudian diluncurkan untuk mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah.



> Saya sampai **enam kali** melakukan pertemuan di OJK untuk memperjuangkan hal ini, dan ini baru terjadi **di era pemerintahan Presiden Prabowo**
> - Maruarar Sirait

Apa yang Berubah?

Catatan kredit dengan nominal **di bawah Rp1 juta dapat mengajukan rumah subsidi**

Data kredit yang telah dilunasi diperbarui **maksimal H+3 setelah pelunasan**

SLIK yang lebih mutakhir, akses pembiayaan yang semakin terbuka.

Penyempurnaan SLIK diharapkan dapat mendukung proses pembiayaan KPR Rumah Subsidi bagi MBR dan menjadi bagian dari upaya percepatan Program 3 Juta Rumah.

Kinanti Juli



Menjaga Kepercayaan,
Memperkuat Tata Kelola

KEMENTERIAN PKP RAIH OPINI WTP

DALAM LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Sebagai kementerian yang masih relatif baru, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus membangun fondasi tata kelola pemerintahan yang kuat. Di tengah proses tersebut, satu capaian penting berhasil diraih: opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Capaian ini menjadi penanda bahwa proses membangun organisasi juga berjalan seiring dengan upaya menjaga pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel. Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut diterima langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait pada 4 Agustus 2026 di Auditorium BPK RI, Jakarta.

Namun, WTP bukan sekadar predikat yang berhenti pada laporan keuangan. Lebih dari itu, capaian ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan publik harus terus dijaga melalui kerja yang transparan, berintegritas, dan bertanggung jawab.

Bagi Kementerian PKP, tata kelola yang baik juga harus berjalan seiring dengan manfaat yang dirasakan masyarakat. Administrasi dan prosedur yang tertib menjadi fondasi agar setiap program dapat dilaksanakan dengan lebih tepat, efektif, dan memberi dampak nyata.

Ilham Bintang

> **Barusan kami menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK. Terima kasih kepada BPK atas hasil pemeriksaannya, dan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian PKP yang telah bekerja keras. Walaupun kementerian ini masih baru dengan berbagai latar belakang pegawai yang berbeda, kita bersyukur hari ini mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.**
>
> **Maruarar Sirait**



Membuka Jalan, Mempercepat Rumah Rakyat



Pemerintah terus memperkuat upaya penyediaan hunian layak melalui sinergi lintas kementerian. Salah satunya melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Melalui kebijakan ini, sejumlah hambatan yang selama ini dirasakan masyarakat mulai dipermudah. Pemerintah daerah didorong memberikan pembebasan BPHTB dan retribusi PBG untuk rumah MBR. Proses penerbitan PBG juga dipercepat agar pembangunan rumah dapat berjalan lebih efisien dan masyarakat memperoleh kepastian waktu yang lebih jelas.

Kemudahan lainnya hadir melalui penyesuaian kriteria MBR berdasarkan empat zona wilayah, sehingga batas penghasilan dapat menyesuaikan kondisi ekonomi di masing-masing daerah. Masyarakat juga memiliki pilihan yang lebih luas karena rumah subsidi dapat diperoleh tanpa harus terikat pada domisili KTP setempat.

Bagi masyarakat, kebijakan ini dapat mengurangi biaya awal sekaligus menyederhanakan proses memperoleh rumah. Sementara bagi pelaku pembangunan, percepatan perizinan dan penyelesaian kendala pertanahan diharapkan dapat memberikan kepastian dalam proses penyediaan hunian. Persoalan lahan, termasuk yang berkaitan dengan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), juga terus diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan proses yang semakin sederhana, biaya yang lebih ringan, dan kepastian yang lebih baik, penyediaan rumah bagi MBR diharapkan dapat bergerak lebih cepat. Pada akhirnya, berbagai kemudahan ini diarahkan untuk membuat akses terhadap rumah layak menjadi semakin mudah dan terjangkau, sekaligus mendorong bertambahnya pasokan rumah bagi masyarakat.

Fitrah

Mengusung Konsep TOD, Kementerian PKP dan PT KAI Bangun Rusun Manggarai

Hunian vertikal terjangkau yang terintegrasi dengan transportasi publik di pusat Kota Jakarta.

Jakarta terus menghadapi tantangan penyediaan hunian di tengah keterbatasan lahan perkotaan. Menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) membangun Hunian Terjangkau Manggarai di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta. Pembangunan ditandai dengan *groundbreaking* pada Jumat (21/8/2026) di atas lahan sekitar 2,1 hektare milik PT KAI.

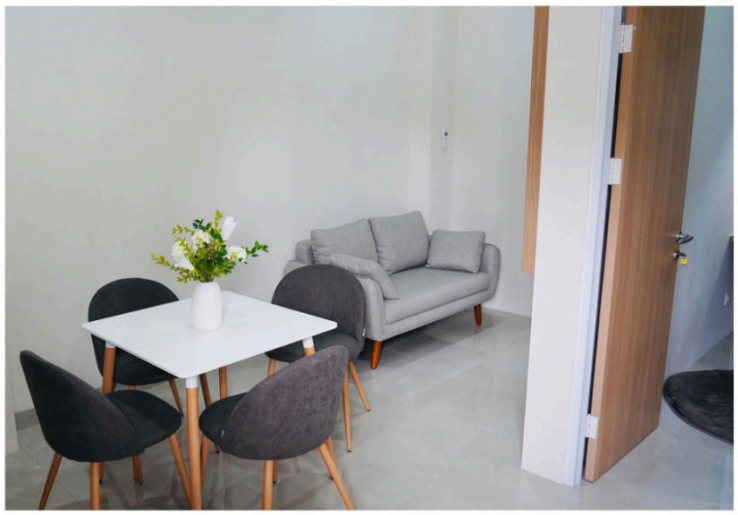
Hunian vertikal ini dikembangkan dengan konsep **Transit-Oriented Development (TOD)**, yaitu pendekatan pengembangan kawasan yang mengintegrasikan hunian dengan transportasi publik dan pusat aktivitas perkotaan. Berada di kawasan Stasiun Manggarai, penghuni nantinya memiliki akses terhadap KRL Commuter Line, KA Bandara, dan kereta api antarkota, serta konektivitas menuju MRT, LRT, dan TransJakarta. Konsep ini diharapkan dapat mendekatkan masyarakat dengan transportasi publik sehingga perjalanan sehari-hari menjadi lebih mudah dan efisien.

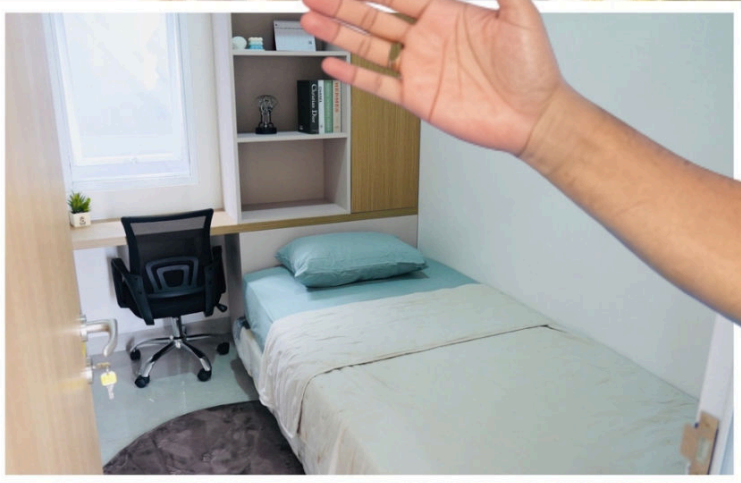


Kawasan Hunian Terjangkau Manggarai direncanakan memiliki delapan tower dengan tiga pilihan tipe hunian, yaitu studio seluas 28 meter persegi, tipe 36, dan tipe 45. Selain hunian, tersedia sekitar 150 unit ruang usaha atau retail sebagai fasilitas pendukung. Hunian ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan dukungan pembiayaan yang memungkinkan tenor hingga 40 tahun.

Pembangunan ini menjadi bagian dari kolaborasi pemerintah dan BUMN dalam menghadirkan hunian yang layak dan terjangkau di lokasi strategis. Dengan memadukan hunian, transportasi publik, dan aktivitas ekonomi dalam satu kawasan, Rusun Manggarai diharapkan dapat menjadi salah satu model pengembangan hunian perkotaan yang lebih terintegrasi.

Indar Amila







Danantara Housing Expo 2026
Perkuat Ekosistem Hunian Nasional

Memiliki rumah bukan hanya soal menemukan bangunan yang tepat. Ada harga, lokasi, pembiayaan, legalitas, hingga pengembang yang harus dipertimbangkan. Danantara Housing Expo 2026 hadir untuk mempertemukan semua kebutuhan tersebut dalam satu tempat.

Digelar di NICE PIK 2, Kabupaten Tangerang, Banten, pada 27–30 Agustus 2026, Danantara Housing Expo menghadirkan lebih dari 170 pengembang, perbankan, pemerintah, serta berbagai industri pendukung perumahan.

Lebih dari 100.000 unit hunian ditawarkan, mulai dari rumah subsidi hingga hunian komersial dan vertikal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Masyarakat juga dapat langsung mencari informasi rumah, berkonsultasi mengenai pembiayaan, hingga memilih skema KPR yang sesuai.

Bagi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi untuk mempercepat Program 3 Juta Rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pembangunan rumah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, pengembang, perbankan, dan seluruh pelaku industri perumahan harus bergerak dalam satu ekosistem.





> **Yang paling penting adalah bagaimana seluruh pihak bergerak bersama**
> **- Maruarar Sirait**

Dari sisi pembiayaan, pemerintah juga terus memperluas akses masyarakat. Dukungan tersebut antara lain melalui Kredit Program Perumahan dan peningkatan kuota FLPP menjadi 350.000 unit pada 2026.

Antusiasme masyarakat pun terlihat dari aktivitas selama pameran. Danantara Indonesia menyebut nilai transaksi yang terjadi selama expo mencapai sekitar Rp2 triliun.

Angka tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap rumah dan pembiayaan masih sangat besar.

Danantara Housing Expo 2026 akhirnya bukan sekadar tempat mencari rumah. Expo ini menjadi ruang untuk mempertemukan masyarakat, rumah, pembiayaan, dan industri dalam satu ekosistem.

Karena pada akhirnya, rumah bukan sekadar bangunan.

Rumah adalah tempat sebuah keluarga membangun kehidupan dan mewujudkan masa depan.

Wahyu Adi











Kementerian PKP Masuk Tiga Besar Nasional

dalam Anugerah Layanan Investasi 2026

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menorehkan prestasi dengan meraih peringkat ketiga nasional dalam Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2026 untuk kategori Kementerian Negara/Lembaga dengan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB). Kementerian PKP meraih nilai 94,435 dengan kategori Sangat Baik.

Penghargaan ini menjadi apresiasi atas upaya Kementerian PKP dalam memperkuat layanan perizinan dan menciptakan kemudahan berusaha di sektor perumahan. Bagi sektor yang membutuhkan dukungan investasi dan pembiayaan dalam skala besar, proses perizinan yang sederhana, transparan, terintegrasi, dan memberikan kepastian menjadi bagian penting dalam mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat.



Kementerian PKP terus menyelaraskan berbagai aspek teknis sektor perumahan, mulai dari regulasi bangunan, zonasi permukiman, hingga prasarana dan sarana, agar terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission* (OSS). Penguatan tata kelola ini juga mencakup kebijakan, regulasi, standar, pembinaan dan pengawasan, perizinan, serta perlindungan konsumen.





Capaian tersebut menjadi dorongan bagi Kementerian PKP untuk terus menghadirkan layanan yang semakin mudah dan pasti bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan investasi di sektor perumahan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hunian dan perluasan akses masyarakat terhadap rumah yang layak.

Ilham Bintang





Mengakselerasi Program, Memperluas Akses Hunian

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terus mendorong percepatan pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak melalui pembangunan, peningkatan kualitas rumah, dan dukungan pembiayaan.

Hingga 8 Oktober 2026, penyerapan anggaran Kementerian PKP secara keseluruhan telah mencapai 45,41 persen. Capaian tersebut sejalan dengan percepatan pelaksanaan berbagai program yang bersumber dari APBN, mulai dari pembangunan hunian, peningkatan kualitas rumah, hingga penanganan kawasan permukiman.

Pada Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, realisasi anggaran telah mencapai 34,62 persen. Sejumlah pembangunan rumah susun juga menunjukkan progres signifikan.

Rusun di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk hunian TNI telah selesai 100 persen, sementara rusun mencapai 73,70 persen dan realisasi rumah khusus telah mencapai 17,57 persen terhadap pagu.

Di sektor perdesaan, realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan telah mencapai 59,18 persen. Sementara itu, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mencatatkan realisasi sebesar 82,09 persen, Direktorat jenderal Kawasan Permukiman mencapai 35,85 persen sedangkan Inspektorat Jenderal mencapai 74,44 persen.

Bedah Rumah Terus Dipercepat

Program Bedah Rumah menjadi salah satu program yang terus didorong percepatannya. Hingga 8 Oktober 2026, sebanyak 212.167 unit rumah telah selesai dibangun, dengan realisasi anggaran mencapai 53,26 persen.

Pemerintah juga terus menyederhanakan mekanisme pelaksanaan program. Persyaratan penerima manfaat dipermudah, sekaligus mendorong agar pelaksanaan Bedah Rumah pada tahun berikutnya dapat dimulai lebih awal sehingga manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat.

Pembiayaan Perumahan Semakin Luas

Percepatan program perumahan juga didukung melalui Kredit Program Perumahan (KPP). Hingga 18 Oktober 2026, penyaluran KPP telah mencapai Rp27,74 triliun kepada 115.897 debitur, atau sekitar 68,21 persen dari target.

Dari sisi supply, pembiayaan mencapai Rp9,46 triliun kepada 3.883 debitur yang terdiri atas pengembang, toko bahan bangunan, dan kontraktor. Sementara dari sisi demand, KPP telah dimanfaatkan untuk renovasi, pembelian, dan pembangunan rumah.

Melalui percepatan pelaksanaan program, penyederhanaan mekanisme, dan perluasan akses pembiayaan, Kementerian PKP terus mendorong agar manfaat pembangunan perumahan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Haris

Capaian Program Perumahan *per 8 Oktober 2026*

59,64%
Serapan anggaran Kementerian PKP

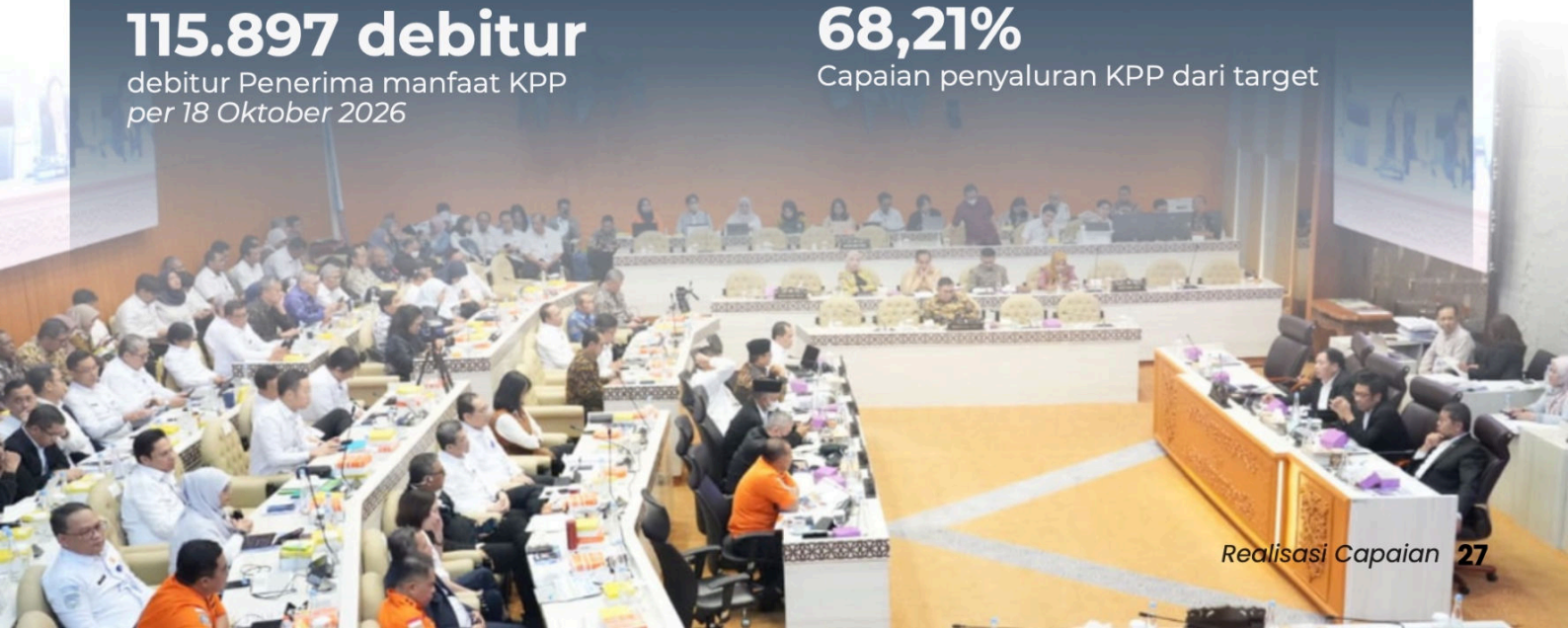
60.195 unit
Bedah Rumah selesai dibangun

53,26%
Realisasi anggaran Program Bedah Rumah

Rp27,7 T
Penyaluran Kredit Program Perumahan *per 18 Oktober 2026*

115.897 debitur
debitur Penerima manfaat KPP *per 18 Oktober 2026*

68,21%
Capaian penyaluran KPP dari target



Realisasi Bedah Rumah

Total CPB (Versul) **629.747** Unit	Direkomendasikan (Verfal) **276.526** Unit	Pagu Anggaran **Rp. 8,64 T**	Dokumen RAB **120.690** Dokumen
Unit Cair (SP2D) **285.579** Unit	Selesai Verifikasi Faktual **462.031** Unit	Rantai Suplai Bahan Bangunan **3.818** Toko	Realisasi Anggaran **Rp. 6,13 T** (70,90 %)

Program Bedah Rumah menjadi salah satu langkah nyata Pemerintah dalam meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpeghasilan rendah. Hingga 21 September 2026 realisasi program ini terus menunjukan progres positif, baik dari sisi penyaluran bantuan rumah yang renovasi.

Pelaksanaan Bedah Rumah memberikan dampak langsung bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas rumah menjadi lebih layak, aman, sehat, dan nyaman.

Perbaikan hunian turut meningkatkan kualitas hidup dan kenyamanan keluarga, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui penggunaan bahan bangunan serta tenaga kerja setempat. Di lapangan, program ini juga memperkuat gotong royong dan partisipasi masyarakat, sehingga penerima bantuan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi turut berperan dalam mewujudkan rumah yang lebih layak bagi keluarganya.



Realisasi Kredit Program Perumahan

Realisasi Penyaluran Pembiayaan KPP

Periode **1 Januari – 25 Oktober 2026** · Total realisasi Rp28,34 triliun untuk 117.946 debitur

TOTAL REALISASI	JUMLAH DEBITUR	DARI PLAFON RTP	DARI PLAFON KOMJAK
Rp28,34 T	**117.946**	**69,67%**	**56,69%**
Rp28.342.712.661.012	3.952 supply + 113.994 demand	Dari target Rp40,68 triliun	Dari plafon Rp50 triliun

Capaian per Sisi

Sisi Supply — 53,81%

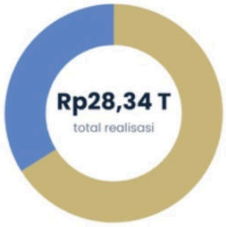
Rp9,61 T dari target Rp17,86 T

Sisi Demand — 82,09%

Rp18,73 T dari target Rp22,82 T

Catatan plafon: Semula plafon RTP Rp40,47 triliun, kemudian terdapat persetujuan RTP pada Bank Syariah Nasional senilai Rp205 miliar.

Distribusi Realisasi



Sisi Demand	Rp18,73 T · 113.994 debitur	66,10%
Sisi Supply	Rp9,61 T · 3.952 debitur	33,90%

Rincian per Sektor

SISI DEMAND

SEKTOR	DEBITUR	RUPIAH
Renovasi Rumah	93.296	Rp13,85 T
Pembelian Rumah	10.902	Rp2,92 T
Pembangunan Rumah Guna Mendukung Kegiatan Usaha	9.796	Rp1,96 T

SISI SUPPLY

SEKTOR	DEBITUR	RUPIAH
Pengembang Perumahan	1.432	Rp5,55 T
Pedagang Bahan Bangunan	2.110	Rp2,99 T
Penyedia Jasa Konstruksi	410	Rp1,08 T

Pergerakan Plafon Penyaluran KPP

Periode **1 Januari – 25 Oktober 2026** · Plafon naik dari Rp29,75 triliun menjadi Rp40,68 triliun

PLAFON SAAT INI	PENAMBAHAN PLAFON	TOTAL DEBITUR
Rp40,68 T	**Rp10,93 T**	**98.249**
Rp40.679.021.600.000	Dari plafon awal Rp29,75 triliun	Naik 31.806 dari 66.443 debitur

Dari Awal ke Saat Ini

Plafon RTP dalam triliun rupiah

KETERANGAN	NILAI
Plafon Awal	Rp29,75 T
Tahap I	+Rp7,33 T
Tahap II	+Rp1,30 T
Tahap III	+Rp2,30 T
Plafon Saat Ini	**Rp40,68 T**

Plafon Kredit per Bank

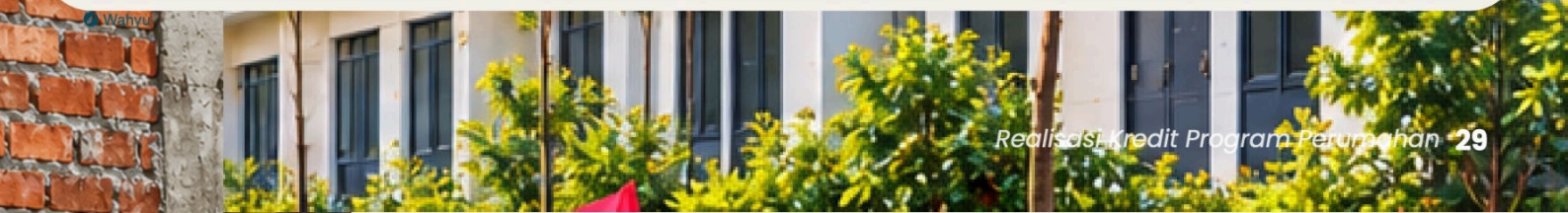
Kondisi saat ini, diurutkan dari terbesar

BANK	PLAFON SAAT INI
BRI	Rp16,00 T
BNI	Rp2,70 T
Mandiri	Rp2,50 T
BSI	Rp1,85 T
BPD Jateng	Rp1,50 T
BPD Bali	Rp299,85 M
BPD Jatim	Rp218,91 M
Bank Syariah Nasional	Rp205 M
Artha Graha	Rp100 M
Mandiri Taspen	Rp40 M

Penambahan per Bank

Total penambahan plafon sepanjang periode

BANK	PENAMBAHAN
BRI	+Rp8,00 T
BSI	+Rp1,50 T
BNI	+Rp1,20 T
Mandiri	+Rp1,00 T
BPD Jateng	+Rp500 M
BPD Bali	+Rp65,85 M
BPD Jatim	+Rp46,26 M
Mandiri Taspen	+Rp20 M
Bank Syariah Nasional	Rp0
Artha Graha	-Rp1,40 T



PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TENTANG
BEDAH RUMAH

Syarat Penerima Bantuan

- Warga Negara Indonesia (WNI)
- Memiliki atau menempati satu-satunya rumah tidak layak huni minimal 1 tahun terakhir
- Menyewa atau mengontrak rumah dalam kondisi tidak layak huni (khusus daerah padat dan kota metropolitan)
- Masyarakat Desil 1-4 dan diutamakan Desil 1-2 DTSEN atau berpenghasilan maksimal sebesar UMP/UMK
- Belum pernah menerima bantuan stimulan perumahan swadaya/bedah rumah pemerintah/bantuan kemudahan atau pembiayaan perumahan dari pemerintah bagi MBR dakan 5 tahun terakhir (kecuali terdampak bencana, kebakaran, penataan kawasan kumuh)

Komponen Penilaian

1. Keselamatan Bangunan, bangunan rapuh, atap bocor, dinding retak, pondai tidak kuat dll.
2. Kecukupan Luas Minimum Bangunan, bangunan terlalu sempit, ruangan sangat terbatas.
3. Kesehatan Penghuni, tidak ada jendela atau lubang angin, lembab, kebersihan buruk, dll

Cara Pengajuan Permohonan

1. Melalui RT/RW atau Kepala Desa/Lurah/Camat untuk kemudian diusulkan oleh Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/ Walikota)
2. Tokoh Nasional/ Tokoh Agama/ Tokoh Adat/ Tokoh Masyarakat/ Ketua Ormas
3. Pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara, menteri/kepala lembaga
4. Mengajukan melalui https://sibaru.pkp.go.id/
5. Sebelum diberikan bantuan, usulan akan dicek/diverifikasi terlebih dahulu oleh pemerintah.

Status Tanah

- Tanah ulayat
- Tanah milik keluarga besar
- Tanah hibah
- Tanah Girik

atau

- Surat pernyataan menempati rumah dan tanah yang ditandatangani sendiri dan cukup diketahui kepala desa/lurah
- Tanah sesuai dengan peruntukan kawasan permukiman dalam rencana tata ruang dan tidak dalam sengketa.

Setelah diperbaiki rumah wajib ditempati Minimal 3 tahun


Material/ Bahan Bangunan
Rp. 17,5 Juta


Upah Tukang
Rp2,5 Juta

Rp 20 Juta
Besaran Bantuan Tahun 2026


Masyarakat akan didampingi oleh Tenaga Pendarmping Masyarakat (TPM) atau pegawai Kementerian PKP selama pelaksanaan.

Avifah

400.000 UNIT RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

BEDAH RUMAH

RUMAH LAYAK, HIDUP LEBIH BAIK!



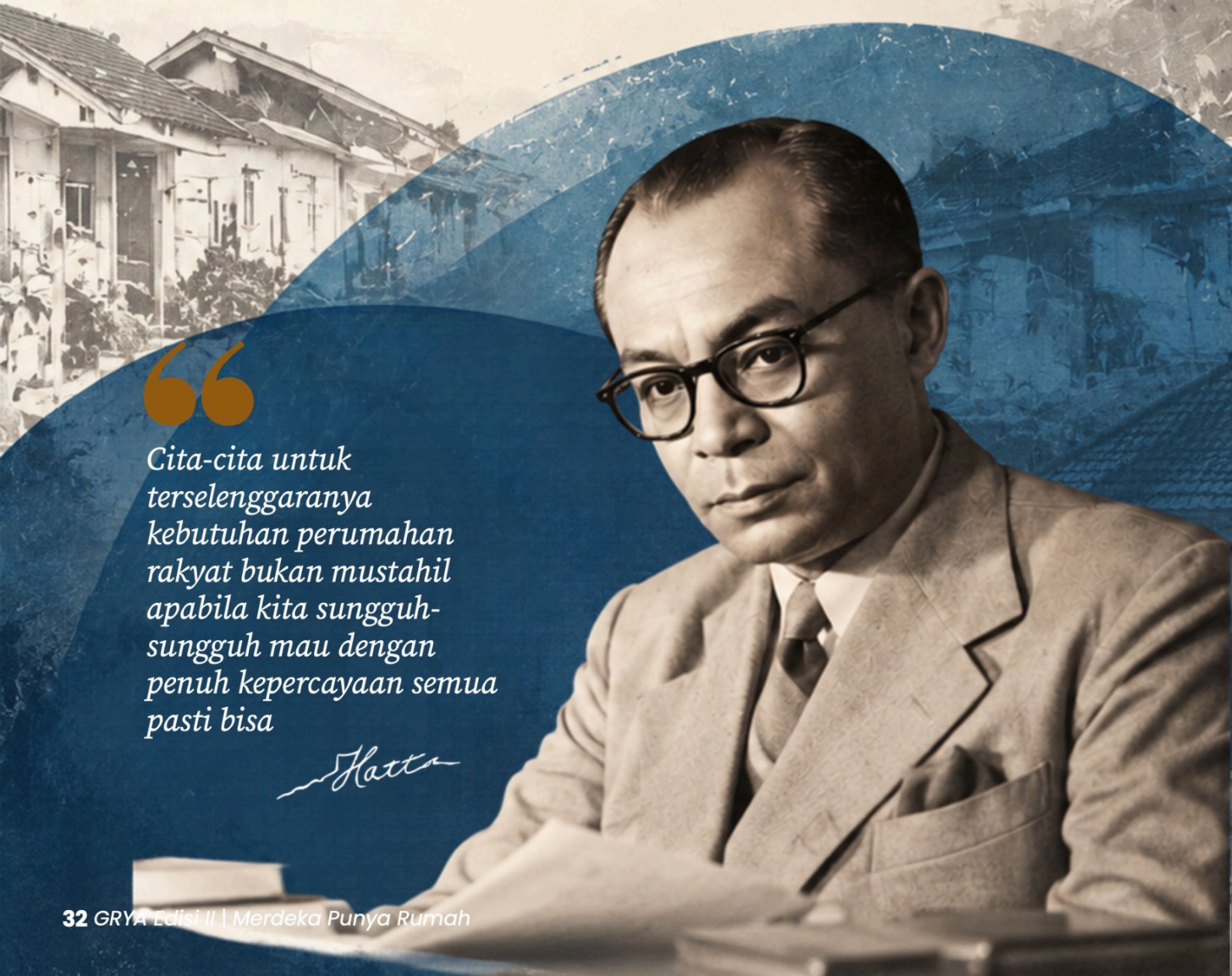
PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
BEDAH RUMAH



MOHAMMAD HATTA

BAPAK PERUMAHAN INDONESIA

Memiliki rumah sendiri menjadi impian banyak keluarga. Namun, bagi sebagian masyarakat, perjalanan untuk mendapatkan rumah subsidi tidak selalu berjalan mudah. Ada yang masih terkendala catatan kredit, meskipun ingin dan mampu mengajukan KPR. Melihat kondisi tersebut, Kementerian PKP bersama OJK mendorong perubahan kebijakan SLIK agar semakin banyak masyarakat berkesempatan memiliki rumah.



Cita-cita untuk terselenggaranya kebutuhan perumahan rakyat bukan mustahil apabila kita sungguh-sungguh mau dengan penuh kepercayaan semua pasti bisa

Hatta

Sejarah Perumahan Rakyat



Mohammad Hatta atau Bung Hatta merupakan Proklamator dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia yang turut memperjuangkan pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat.
Pada 25–30 Agustus 1950, Bung Hatta membuka Kongres Perumahan Rakyat Sehat di Bandung. Kongres ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah pembangunan perumahan nasional.
Bagi Bung Hatta, rumah yang layak dan sehat merupakan bagian penting dari kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Gagasan Bung Hatta tentang Perumahan

Bagi Bung Hatta, rumah memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Hunian yang layak, sehat, dan terjangkau merupakan salah satu kebutuhan dasar yang perlu mendapat perhatian bersama.
Penyediaan perumahan rakyat memerlukan keterlibatan pemerintah dan masyarakat, disertai semangat gotong royong untuk memperluas akses terhadap hunian yang layak.
Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi bagian dari upaya mewujudkan kehidupan yang layak dan sejahtera bagi rakyat.

Warisan Pemikiran Bung Hatta

Kongres Perumahan Rakyat Sehat tahun 1950 menjadi salah satu landasan penting bagi perkembangan kebijakan perumahan di Indonesia. Sejak saat itu, penyediaan hunian bagi masyarakat terus menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional.
Pemikiran Bung Hatta mengenai pentingnya rumah sehat dan terjangkau tetap menjadi inspirasi dalam mendorong pembangunan perumahan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Avifah

Melalui kolaborasi pemerintah, pengembang, lembaga pembiayaan, dan masyarakat, pembangunan perumahan diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.



BP3KP NUSA TENGGARA I

Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, Berintegritas dalam Melayani

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I (BP3KP NT I) hadir untuk mendukung penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di Bali dan Nusa Tenggara Barat. Didukung 114 pegawai, BP3KP NT I menjalankan berbagai program pada 2025–2026, mulai dari pembangunan Rusun MBR di Sesetan, Denpasar, BSPS di Bali dan NTB, bantuan PSU, hingga penanganan kawasan kumuh di Sumbawa Besar.

Berbagai upaya tersebut turut tercermin dalam capaian kinerja BP3KP NT I. **Capaian kinerja tercatat 100 persen, sementara IPKP meningkat dari 3,58 pada 2025 menjadi 3,61 pada 2026. IKM juga meningkat dari 88,10 pada Triwulan III 2025 menjadi 89,44 pada Triwulan I 2026 dengan kategori sangat baik.**

Bagi BP3KP NT I, pembangunan Zona Integritas menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk menghadirkan pelayanan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas bagi masyarakat.





Penguatan integritas juga dilakukan melalui digitalisasi dan pengawasan, mulai dari verifikasi program, dokumentasi, monitoring digital, hingga kanal pengaduan masyarakat.

Di lingkungan internal, berbagai inovasi seperti *Apel Pagi (Coffee Morning)*, *Si-Evan*, dan *SI-KOPI* turut mendukung komunikasi, transfer pengetahuan, serta internalisasi nilai integritas dan pencegahan korupsi.

Tak hanya membangun hunian, BP3KP NT I juga terus memperkuat tata kelola dan pelayanan melalui pembangunan Zona Integritas yang telah dimulai sejak 2021. Pada 2026, penguatan dilakukan sebagai persiapan menuju penilaian Tim Penilai Nasional (TPN) dengan target predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Salah satu inovasinya adalah PELIKAN (Pelayanan Publik Perumahan) sebagai kanal informasi dan konsultasi, yang diperluas melalui Booth Klinik PKP dan Klinik Perumahan Goes to Campus. Sepanjang 2025, Klinik PKP mencatat 1.291 layanan.

Indar Amila



Proses



Sesudah



GoPKP: Dari Usulan Sampai Pencairan, Bedah Rumah Kini Serba Digital

Satu dashboard, ratusan ribu unit rumah, satu tujuan: bedah rumah yang lebih tertata.

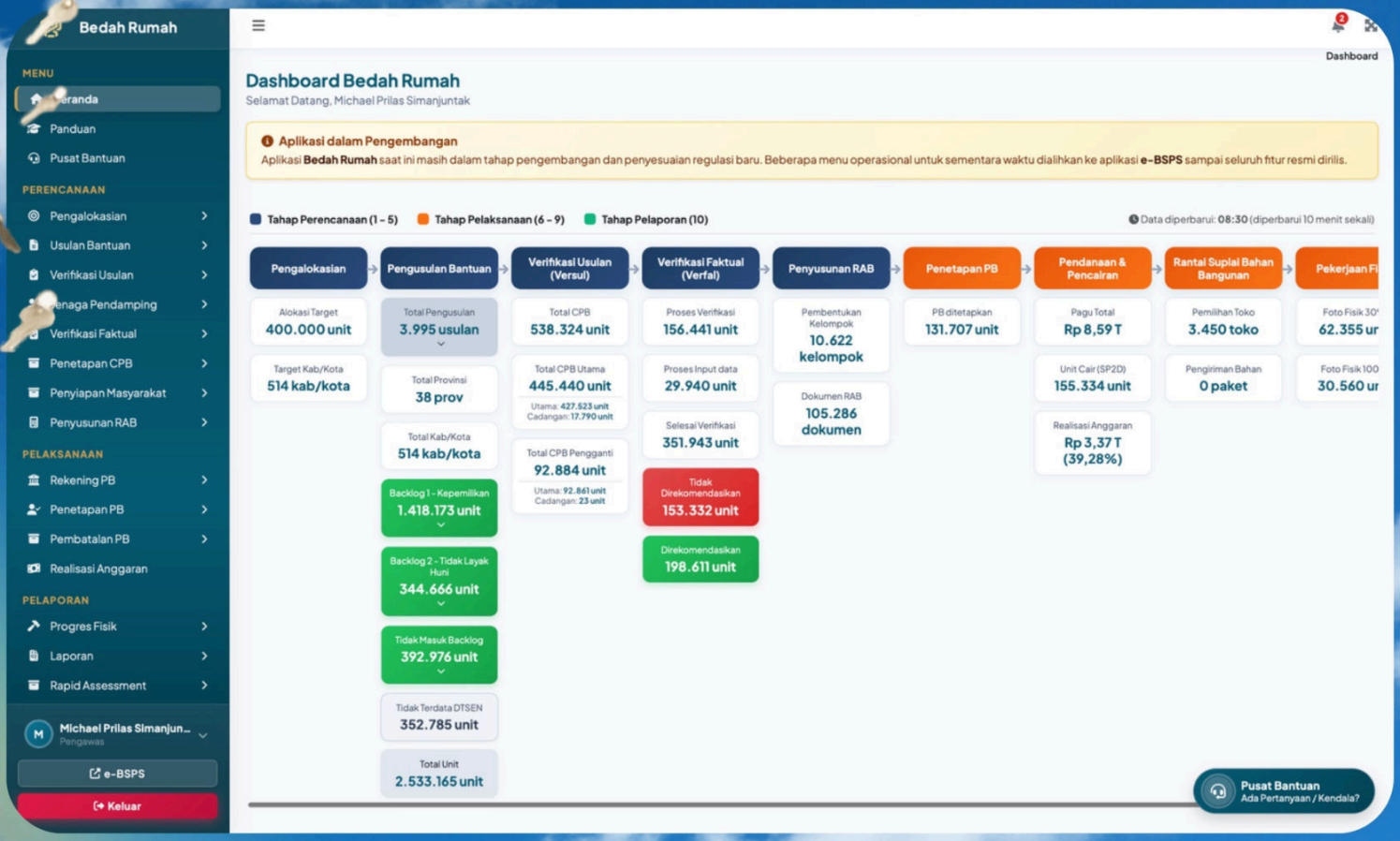
Coba bayangkan memantau 400.000 target unit rumah, tersebar di **514 kabupaten/kota** di **38 provinsi**, secara real-time, dari layar yang sama. Itulah yang kini bisa dilakukan lewat ekosistem digital GoPKP, mulai dari aplikasi lapangan untuk surveyor sampai dashboard "Bedah Rumah" yang memantau seluruh perjalanan program bedah rumah BSPS dari perencanaan hingga rumah benar-benar berdiri.

Satu Layar, Sepuluh Tahap

Dashboard ini membagi perjalanan program ke dalam tiga fase besar. Fase Perencanaan mencakup Pengalokasian, Pengusulan Bantuan, Verifikasi Usulan, Verifikasi Faktual, hingga Penyusunan RAB. Fase Pelaksanaan mencakup Penetapan Penerima Bantuan (PB), Pendanaan dan Pencairan, Rantai Suplai Bahan Bangunan, sampai Pekerjaan Fisik di lapangan. Terakhir, fase Pelaporan merangkum seluruh progres jadi satu gambaran utuh.

Michael Prilas





Bukan Cuma Dashboard Biasa

Setiap tahap program dipecah jadi kategori yang bisa ditelusuri, dari unit yang masih diverifikasi, direkomendasikan, ditolak, sampai masuk backlog. Aksesnya juga berjenjang, pengawas, admin, koordinator, dan fasilitator lapangan cuma bisa lihat dan kelola sesuai tugas masing-masing. Datanya sendiri diperbarui otomatis tiap 10 menit, jadi perubahan di lapangan langsung tercermin tanpa nunggu laporan manual direkap ulang.



Semua Terpantau, Semua Bisa Dilacak

Yang membuat dashboard ini menarik, datanya diperbarui otomatis setiap 10 menit, jadi bukan laporan yang telat berbulan-bulan. Setiap tahap, dari unit yang direkomendasikan, ditolak, sampai yang masih menunggu verifikasi, tercatat jelas dan bisa ditelusuri. Ini bukan cuma soal digitalisasi administrasi, tapi soal memastikan bantuan benar-benar sampai ke rumah yang tepat, dan setiap rupiah bisa dipertanggungjawabkan sampai unit terakhir.



RUMAH yang mengubah Hidup

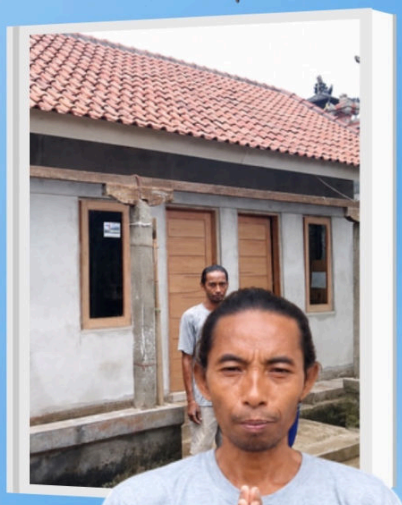
Cerita dari penerima manfaat program perumahan yang membuktikan bahwa hunian bukan sekedar bangunan, tetapi awal dari masa depan yang lebih baik

Haris



Bedah Rumah BSPS

Denpasar, Bali



"Awalnya rumah saya bocor. Setelah dapat program bedah rumah BSPS, sekarang rumah saya sudah bagus. *Matur suksma* Kementerian PKP"

I Wayan Sudarmo
Petani



Kredit Rumah Subsidi FLPP

Perumahan Puri Harmoni Indah, Serang



"Waktu lihat brosur Puri Harmoni Indah, saya tanyakan lagi soal slip gaji, Alhamdulillah, katanya bisa nggak pakai slip gaji."

Pak Samin
Tukang Bakso Keliling



RUSUN Untuk ASN

Rusun Kejaksaan Tinggi Papua, Jayapura

"Nyaman banget. Fasilitasnya oke banget seperti kos-kosan elit. Ada showernya lagi, gak mandi pake gayung. Dekat banget cuma 500 meter ke kantor."

Wulan
ASN Kejaksaan RI Papua



Kredit Program Perumahan KPP

Jawa Barat

"Saya dapat program sebagai penyuplai bahan bangunan. Tahun ini saya dibantu program pinjaman **Kredit Program Perumahan**. Saya merasa terbantu dan mengucapkan terima kasih atas bantuan program pemerintah ini khususnya untuk Toko Buana Jaya."

Ibu Yanti
Pengusaha Toko Bangunan



DARI PUING KE RUMAH BARU: RISHA DAN BATA INTERLOCK MEMBANGUN HARAPAN DI SUMATERA

Setelah bencana merenggut ribuan rumah, dua teknologi konstruksi ini jadi jalan tercepat kembali punya tempat tinggal

Akhir November 2025, banjir bandang dan longsor menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebanyak 1.204 jiwa meninggal dunia, 140 orang hilang, dan hingga awal Februari 2026 masih ada 105.842 pengungsi yang belum punya rumah layak.

Pemerintah menyiapkan 198,92 hektare lahan di 55 lokasi untuk Hunian Tetap (Huntap) relokasi terpusat, menyasar 6.220 unit di Aceh, 919 unit di Sumatera Utara, dan 813 unit di Sumatera Barat. Kunci huntap pertama diserahkan 10 Juli 2026, hanya berselang bulan dari mulai pembangunan. Kecepatan ini tak lepas dari dua teknologi konstruksi yang dipakai, RISHA dan Bata Interlock Presisi.



01

RISHA, Si Veteran yang Terus Terbukti

RISHA, Rumah Instan Sederhana Sehat, sudah ada sejak 2004, lahir dari kebutuhan rekonstruksi pascatsunami Aceh. Sistem panel pracetak knock-down ini kini sudah diterapkan lebih dari 10.000 unit di berbagai daerah.

Satu modul (3x3 meter) hanya butuh 24 jam pengerjaan oleh 3 pekerja tanpa alat berat. Dari sisi biaya, RISHA bisa menekan anggaran sekitar 11% dibanding metode konvensional, dengan waktu bangun sekitar 7 minggu, lebih cepat 3 minggu dari cara biasa.



02

Bata Interlock, Inovasi Anak Bangsa untuk Rumah Tanah Gempa

Di Sumatera Barat, dipakai Bata Interlock Presisi, bata bertoleransi presisi ±1 mm yang saling mengunci tanpa banyak semen, perendaman, atau bekisting, membuat konstruksi 1,5-2 kali lebih cepat. Teknologi ini tercatat memiliki TKDN 97,09% dari Kemenperin, dan telah direkomendasikan resmi oleh BNPB untuk Rumah Tahan Gempa setelah lolos uji ketahanan gempa oleh Kementerian PU dan Laboratorium Rekayasa Struktur ITB. Konstruksinya juga diklaim mengurangi emisi karbon hingga 38%.

Michael Prilas



21-30 hari
waktu konstruksi lebih cepat

TKDN 97,09%
kandungan lokal anak bangsa

Presisi ±1mm
toleransi tinggi untuk hasil lebih baik

Emisi -38%
lebih rendah untuk lingkungan lebih baik

Apa harapan untuk Hari Perumahan Nasional?



Selamat Hari Perumahan Nasional! Semoga melalui setiap langkah dan pengabdian yang PKP lakukan, makin banyak keluarga Indonesia yang dapat memiliki hunian yang layak, aman, dan nyaman. **Karena ketika kita membantu seseorang memiliki rumah, kita juga membantu mereka membangun kehidupan dan masa depan yang lebih cerah.**

Imelda Gita Nugrahani, S.Ars.
BP3KP Jawa III

Selamat Hari Perumahan Nasional 2026! Semoga upaya Kementerian PKP dalam menghadirkan hunian yang layak terus menjangkau lebih banyak masyarakat hingga ke pelosok daerah, dengan **bantuan yang tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya.**



Elora Ivena, S.Ars.
BP3KP Kalimantan I



Selamat Hari Perumahan Nasional! Semoga melalui semangat gotong royong, Kementerian PKP terus **menghadirkan inovasi & kolaborasi** untuk mewujudkan akses perumahan yang layak, terjangkau, & berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Rizki Andhika Pratama, S.Ars.
Ditjen Perumahan Perdesaan

Kolom ASN PKP dan Opini Publik



Selamat Hari Perumahan Nasional. Saya berharap melalui program Kementerian PKP, kita bisa **menyediakan lebih banyak rumah layak huni** kepada masyarakat sehingga lebih banyak lagi yang dapat terbantu.

Yudha Rommell Sibero, S.T., M.M.
Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan
Ditjen Perumahan Perkotaan



Dari satu rumah, lahir harapan, dari rumah-rumah yang layak, kita bangun Indonesia yang lebih sejahtera. Bersama Kementerian PKP, **kita bangun kehidupan yang lebih baik, karena setiap orang berhak punya tempat untuk pulang**. Selamat Hari Perumahan Nasional.

Jumbuh Achmad Sukoco, S.T.
Ditjen TKPR



Harapan saya **program perumahan dapat lebih tepat sasaran sesuai dengan regulasi yang berlaku** dan saya bisa terus berkontribusi dalam pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat Indonesia.

Mecris Mides Yumame, S.T.
BP3KP Papua II

Bintang Agna

SUARA APRESIASI DARI WARGA

Layanan Informasi Publik yang Terasa Dekat

Warga bercerita tentang bantuan yang cepat, informasi yang mudah dipahami, dan petugas yang ramah dalam layanan informasi publik dan konsultasi.

> **"Sangat membantu dan responsif."**
> Salah satu pesan sederhana yang mewakili pengalaman positif masyarakat.

PENGALAMAN BAIK YANG DIINGAT

RESPONS CEPAT
"Admin cepat merespons dan membantu menjelaskan informasi sesuai kebutuhan."

RAMAH & JELAS
"Petugas ramah, menjelaskan dengan sopan, dan mudah dipahami."

MUDAH DIAKSES
"Layanan lewat WhatsApp memudahkan warga mendapatkan informasi."

INFORMASI MEMBANTU
"Informasi perumahan dan konsultasinya sangat membantu."

PENUH TERIMA KASIH
"Terima kasih atas pelayanan yang baik dan sangat membantu."

LAYANAN SIGAP
"Warga merasa cepat dibantu dan memperoleh informasi yang dibutuhkan."

PESAN WARGA

Terima kasih sudah membantu kami.

Apresiasi ini menjadi penyemangat untuk terus memberikan layanan yang sigap, ramah, dan mudah diakses.

Melayani Lewat Informasi

Ringkasan permintaan informasi publik • Januari - September 2026

748 **PERMINTAAN INFORMASI**
Seluruhnya telah diputuskan • 0 masih diproses

RATA-RATA WAKTU PEMENUHAN INFORMASI
2,0 Hari

Permintaan Per bulan

JANUARI	92	APRIL	102	JULI	49
FEBRUARI	75	MEI	51	AGUSTUS	88
MARET	37	JUNI	64	SEPTEMBER	190

Status Permintaan

531	Dikabulkan seluruhnya
99	Dikabulkan sebagian
27	**Ditolak**
91	Informasi tidak lengkap
0	Sedang diproses

Siapa yang mengajukan

677	Perseorangan
47	Kelompok orang
24	Badan hukum

KANAL PERMINTAAN

544	WhatsApp
96	Ruang pelayanan publik
108	Email

Jenis Informasi yang Diminta

259	Bedah Rumah	19	Aplikasi/sistem informasi
130	Lain-lain	12	Kemitraan/kerja sama
63	Pembiayaan perumahan (FLPP/SBUM)	7	**KPP/KUR perumahan**
50	Pelayanan publik	4	Perizinan
28	Kebijakan/regulasi	4	Bantuan Pemukiman
28	Konsultasi teknis	3	Jabatan Fungsional
22	Rumah susun	1	Rumah khusus

Sumber: Data PPID Kementerian PKP per 28 Oktober 2026

Detektif GRYA

Empat Pintu Satu Kode Rahasia

1 Cari Dua Petunjuk

- Danu memegang kartu program yang diikuti I Wayan Sudarmo
- Bima memegang kartu program yang diikuti Pak Samin

**lihat rubrik Cerita Penerima Bantuan*

2 Susun Posisinya

Gabungkan temuanmu dengan 5 petunjuk berikut:

1. Bima berada di salah satu rumah paling ujung.
2. Kartu rusun tidak berada di rumah paling ujung.
3. Kartu bedah rumah tepat di sebelah kiri kartu rumah susun.
4. Citra tepat di sebelah kanan Ayu.
5. Rumah Citra dan Bima tidak berdampingan.

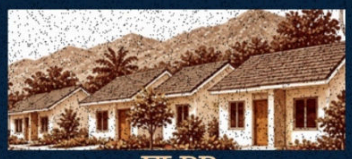
Pasangkan Ayu, Bima, Citra, dan Danu dengan rumah dan kartu programnya. Setiap rumah berisi satu nama dan satu kartu.

1	2	3	4

Urutkan nomor urut peserta sesuai dengan program.



Bedah Rumah



FLPP



Rumah Susun



KPP

Kirimkan jawabanmu lewat kode QR di samping dan ikuti undiannya untuk memenangkan hadiahnya!

Contact Person:
085157751142 (Michael)




KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA